

# KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Muhammad Ichlazul Attaullah

NPP : 30.1246

*Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: [iklasicksoul97@gmail.com](mailto:iklasicksoul97@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Acceleration of poverty alleviation is needed in overcoming the problem of poverty. For developing countries like Indonesia, accelerating poverty alleviation is an urgent effort to be made. **Purpose:** The aim of this research is to identify and analyze the performance, supporting and inhibiting factors, as well as efforts to overcome the inhibiting factors of the regional development planning agency's performance in poverty alleviation in Palu City, Central Sulawesi Province. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The informants in this study were 11 informants. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the performance of regional government has been good in alleviating poverty in Palu City even though the tsunami and Covid disasters were in the process. **Conclusion:** The performance of the Regional Government in poverty alleviation in Palu City has been good even though it was in the process of being hit by the Tsunami and Covid disasters. There are inhibiting factors that affect the performance of the Regional Government Agency in Poverty Alleviation in Palu City, such as a lack of budget and a lack of public attention to the efforts the government has provided.

**Keywords:** Performance, Local Government, Poverty

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Percepatan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan suatu upaya yang mendesak untuk dilakukan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat kinerja badan perencanaan

pembangunan daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 11 informan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Kinerja Pemerintahan Daerah sudah baik dalam pengentasan kemiskinan Di Kota Palu meskipun dalam prosesnya terdapat oleh bencana Tsunami dan Covid. **Kesimpulan:** Kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengentasan kemiskinan Di Kota Palu sudah baik meskipun dalam prosesnya terdapat oleh bencana Tsunami dan Covid. Terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja Badan Pemerintahan Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palu seperti terdapat kekurangan anggaran dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap usaha yang sudah pemerintah berikan.

**Kata kunci:** Kinerja, Pemerintahan Daerah, Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan “Tim koordinasi Penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. Produk hukum pengentasan kemiskinan selanjutnya adalah peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa : Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pemabngunan Jangka Panjang dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Agar arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat selaras antara pemerintah pusat dan daerah, maka perlu dilakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan akan mampu memberikan dampak yang signifikan dibutuhkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan suatu upaya yang mendesak untuk dilakukan. (Todaro & Smith, 2006:232) menjelaskan bahwa : “kemiskinan sering dipandang sebagai bentuk keterbelakangan, yaitu suatu situasi ekonomi yang berada pada taraf hidup yang rendah secara terus menerus dalam hubungannya dengan kemiskinan absolut, pendapatan per kapita yang rendah, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi yang rendah, pelayanan Kesehatan yang buruk, tingkat kematian yang tinggi, tingkat kelahiran yang tinggi, ketergantungan pada ekonomi asing, dan kebebasan yang terbatas untuk memilih antara kegiatan yang memenuhi kebutuhan manusia”.

Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palu sebesar 81,47 atau masuk dalam klasifikasi sangat tinggi dan tertinggi kedua setelah Kota Makassar di Pulau Sulawesi, yang mempunyai IPM sebesar 82,25. Nilai IPM Kota Palu yang masuk klasifikasi sangat tinggi terlihat kontras dengan pengangguran Kota Palu yang angkanya juga paling tinggi diantara Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palu pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,38 persen, atau lebih tinggi dari TPT Sulawesi Tengah pada bulan Februari 2021 yang hanya sebesar 3,73 persen (BPS 2022). Rasidin & Bonar (2004) mengatakan : seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi pada akhirnya akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, hal ini dapat terlihat melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh Pendidikan. Menurut Friedman (dalam Usman, 2006) kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan social. Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional.

Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan pada tahun 2023 Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim dengan mengalokasikan anggaran 39 milyar rupiah untuk kabupaten/kota. Dasar hukum pelaksanaan program Kemiskinan ekstrim yang menjadi acuan Bappeda dalam pengentasan kemiskinan adalah Kepmenko PMK 25/2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim perlu menetapkan lokasi prioritas yang diperluas dari 35 kabupaten menjadi 212 kabupaten/kota pada tahun 2023-2024. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia memasukan 7 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah menekankan bahwa untuk menindak lanjuti instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dari 4% atau 10,86 juta jiwa di tahun 2022 menjadi 0% pada tahun 2024, saat yang bersamaan ia mengatakan bahwa hal ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrim 6 tahun lebih cepat dari target tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023 Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim dengan mengalokasikan anggaran 39 milyar rupiah untuk Kabupaten/Kota melalui program GERCEP-GASKAN-BERDAYA dengan maksud bahwa penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan organisasi berkepentingan dengan perencanaan dan implementasi program yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas yang dengan pengembangan tersebut organisasi berfungsi dan mengelola perubahan. Konteks organisasi berhubungan dengan kinerja atau proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja suatu organisasi dipengaruhi secara langsung oleh rencana dan Tindakan manajerial, struktur organisasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal. Sementara, rencana dan tindakan manajerial serta struktur organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal sebelum memberikan pengaruh pada kinerja organisasi.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah mudah dan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang mana salah satunya adalah ketersediaan portal data dan informasi yang disajikan secara akurat dan akuntabel, serta dapat dengan mudah diakses oleh para pengambil kebijakan dalam hal ini untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023 telah ada program inovasi yang akan dilaksanakan pada 13 Kabupaten/Kota dan mudah-mudahan dengan adanya percepatan pemberian data dan informasi dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah lebih intens lagi untuk melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ekstrim dan pengentasan kemiskinan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Masalah pengangguran Kota Palu tercermin dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang pada tahun 2020 TPT Kota Palu mencapai 16.960 orang. Pada tahun 2021 TPT Kota Palu turun menjadi 15.302 orang atau berkurang 1.658 orang yang sudah mendapat pekerjaan. Penduduk miskin di Kota Palu pun demikian. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Palu berjumlah 26.890 orang dan pada tahun 2021 naik menjadi 28.600 orang. Pengentasan kemiskinan tentunya tidaklah mudah dan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan kinerja dari Bappeda merupakan salah satu kunci untuk dapat menekan jumlah kemiskinan ekstrem yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah seharusnya mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan untuk menghapuskan kemiskinan Ekstrem dari 4% atau 10,86 juta jiwa ditahun 2022 menjadi 0% pada tahun 2024.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didasarkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hajra (2022) dengan judul Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam) dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa wujud penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu diantaranya Perbaikan Rumah, pemberian peralatan menjahit, pemberian alat pertukangan, pemberian alat memasak, dan pemberian alat salon/tata rias serta terdapat dua faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan, yaitu faktor internal datang dari dalam pemerintahan untuk mengatasi kemiskinan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sebelum menerima alat bantuan. Sedangkan eksternal dijalankan oleh masyarakat dari luar Pemerintahan yang dimana dilaksanakan oleh Yayasan LPK Buana Mandiri untuk melaksanakan pelatihan menjahit dan tata rias. Penelitian terdahulu berikutnya adalah yang dilakukan oleh Lantik Kusuma Aji (2019) dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Kedua; Peran Bappeda sebagai leading sector kelembagaan penanggulangan kemiskinan belum berjalan efektif. Kelembagaan penanggulangan kemiskinan pada Bappeda dilaksanakan oleh satu sub bidang dengan jumlah pegawai yang terbatas. Ketiga; Konsep ideal revitalisasi pengaturan kelembagaan Bappeda untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah penguatan Bappeda dengan menambahkan

bidang penanggulangan kemiskinan pada struktur organisasi, penerapan desentralisasi asimetris, Penguatan TNP2K, pembentukan Dinas Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang mempunyai kemampuan memperoleh data akurat dan valid. Penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan penelitian ini juga dilakukan oleh Soni Kurniawan, Andy Fefta Wijaya dan Tjahjanulin Domai dengan judul “Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dan hasil penelitiannya adalah Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas dinilai masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah, dimana hampir 81,28% sampai dengan lulusan SD dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahap pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan dan realisasi pencairan bantuan masih kurang optimal. Realisasi bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam). Pada kinerja output dan outcome, secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Secara kualitas, Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana focus utama penelitian ini adalah Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan sedangkan pada penelitian terdahulu focus utamanya adalah program anti kemiskinan pada pandangan ekonomi islam, bagaimana membangun Kembali peran Bappeda dalam menanggulangi kemiskinan, Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program).

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat kinerja badan perencanaan pembangunan daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yang dimana nantinya untuk mendapatkan data dan ini dianggap tepat untuk digunakan dalam pengamatan ini. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Di dalam proses penelitian akan lengkap untuk mendapatkan

data yang sesuai diinginkan berdasarkan fakta-fakta yang berada dilapangan mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis menentukan informan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan fokus penulisan pada Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Informan yang dipilih oleh peneliti tidak dipilih secara acak, tetapi sebelum memilih informan yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Hubberman dalam Simangunsong (2017:226), bahwa aktivitas dalam analisis berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh melalui beberapa tahapan, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing / verification (penarikan kesimpulan).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah**

##### **1. Produktivitas**

- Rasio output per input

Pengukuran ataupun mengetahui rasio output dan input sangatlah penting dalam menunjang jalannya kinerja Bappeda dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palu. Bagaimana untuk mengukur sejauh mana usaha yang sudah dilakukan dan apa hasil dari usaha itu. Bagaimana mengetahui bahwa pemberian anggaran, bantuan dan lain sebagainya sudah tepat sasaran dan berpengaruh baik terhadap penekanan jumlah kemiskinan di Kota Palu. Hal itu tentu sangat diperlukan mengingat permasalahan-permasalahan mengenai penyalahgunaan wewenang sering terjadi, sehingga untuk mengetahui baik buruknya suatu perangkat daerah dibutuhkan pengukuran produktivitas menggunakan rasio output dan input.

##### **2. Kualitas Pelayanan**

- Sumber Daya Manusia

Kualitas pelayanan bergantung terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Hingga kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk mempermudah segala pekerjaan yang kita ingin capai hasilnya dengan baik. Sumber daya manusia yang berkompeten tentu akan terus menerus mencari inovasi guna membantu, memperbaiki dan menyempurnakan rencana program yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri dalam hal ini Kota Palu.

- Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat untuk mengetahui kualitas pelayanan dapat dikatakan sudah memenuhi. Sebagaimana yang dikatakan camat Palu Timur bahwa masyarakat dengan antusias menjemput segala bentuk program kerja yang diberikan oleh pemerintah guna untuk menekan angka kemiskinan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

##### **3. Responsivitas**

- Prosedur Kerja

Pemerintah sudah responsive dalam membantu masyarakat, dimana dalam pelaksanaan program kerja sudah sesuai dengan prosedur kerja yang direncanakan. Juga respon yang diberikan masyarakat tentu membantu meningkatnya kinerja pemerintah dalam penekanan angka kemiskinan.

– Kepuasan Masyarakat

Responsivitas masyarakat yang dilihat dari kepuasan masyarakat berjalan dengan baik. Dimana masyarakat antusias mendukung menjalankan program kerja yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait.

**4. Responsibilitas**

– Tanggung Jawab Pegawai

Para pegawai di Kota Palu sudah memenuhi kriteria sebagai pegawai yang bertanggung jawab. Bukti ini dapat dilihat dari penyelesaian tugas dan tanggung jawab para pegawai yang dinilai selalu disiplin

– Administrasi pelayanan

Para pelaku tugas dan tanggung jawab bisa digolongkan responsible. Dimana dari administrasi pelayanan yang dilakukan bagi kantor ataupun kepada masyarakat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**5. Akuntabilitas**

– Ukuran Target Yang Dicapai

Target yang diinginkan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan menjadi serendah-rendahnya. Bahkan Walikota Kota Palu mengatakan ingin membuat angka kemiskinan di Kota Palu menjadi 0 persen.

**3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah**

**1. Faktor Pendukung**

– Faktor Pendukung Internal

Faktor yang mendukung dari dalam yaitu personal yang sudah mempunyai bekal kesiapan dan cepat tanggap dalam merespon penanggulangan kemiskinan. Kemudian sarana dan prasarana yang disiapkan oleh dinas-dinas terkait sudah cukup membantu Bappeda dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palu

– Faktor Pendukung Eksternal

Masing-masing perangkat daerah memiliki perannya, bahkan masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan sector kepentingan yang sudah diberikan. Dengan begitu pengentasan kemiskinan di Kota Palu dapat dijalankan dengan lancar dengan adanya faktor-faktor pendukung eksternal.

## **2. Faktor Penghambat**

- Faktor Penghambat Internal  
Pegangan data dan pemberian perhatian terhadap sarana prasarana yang diberikan menjadi alasan terhambatnya program pengentasan kemiskinan. Sampai saat ini hal itu masih menjadi faktor penghambat internal.
- Faktor Penghambat Eksternal  
Pegangan data yang menjadi rujukan Bappeda dalam membuat program pengentasan kemiskinan itu masih kurang dan masih perlu dilakukan pendalaman dalam pendataan masyarakat.

## **3.3 Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah**

### **1. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat**

- Upaya Langsung Internal  
Walikota Kota Palu dan Bappeda sudah berusaha untuk melakukan peningkatan kinerja dalam pengentasan kemiskinan. Tetapi masih mengalami kendala karena kekurangan anggaran dan validasi data dan sikap yang diambil ialah penambahan anggaran saat perencanaan APBD dan terjun langsung ke masyarakat dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bappeda sendiri.
- Upaya Langsung Eksternal  
upaya langsung yang dilakukan oleh perangkat daerah sudah dilaksanakan. Pengembangan kemampuan pegawai, pemanfaatan masyarakat dan membantu para warga yang menyandang permasalahan kesejahteraan sosial.
- Upaya Tidak Langsung Internal  
Peningkatan jumlah pegawai dilakukan dengan pemanfaatan Tenaga Harian Lepas. Peran masyarakat dalam merepon program pemerintah sangat dibutuhkan sehingga sosialisasi dan peningkatan pemahaman perlu dilakukan.
- Upaya Tidak Langsung Eksternal  
Koordinasi dari perangkat daerah untuk bekerja sama dan terjun langsung ke masyarakat harus terus diupayakan. Bagaimana masyarakat Kota Palu bisa mendapatkan Pendidikan dan kehidupan yang layak harus diberikan perhatian agar terus diupayakan oleh pemerintah Kota Palu untuk menekan angka kemiskinan.

## **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan peraturan sebagai dasar yang kuat dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang tepat agar arah pembangunan berpihak pada rakyat miskin. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur penanggulangan kemiskinan ini. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hamper mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu melihat tiga fenomena yang berhubungan dengan kemiskinan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu, yakni ketimpangan yang semakin melebar, kerentanan yang tinggi dan penurunan kemiskinan yang melamban. Upaya penanggulangan serta penurunan angka kemiskinan di Palu, memerlukan perencanaan yang berbasis data. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar BIMTEK aplikasi sistem perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisa Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT). Pengentasan kemiskinan tentunya tidaklah mudah dan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan kinerja dari Bappeda merupakan salah satu kunci untuk dapat menekan jumlah kemiskinan ekstrem yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan baik ditinjau dari Produktivitas, Sumber Daya Manusia, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitasnya. Faktor Pendukungnya yaitu personal yang sudah mempunyai bekal kesiapan dan cepat tanggap dalam merespon penanggulangan kemiskinan, sarana dan prasarana yang disiapkan oleh dinas-dinas terkait sudah cukup membantu Bappeda dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palu. Faktor Penghambat; Rujukan dan Pegangan data dan pemberian perhatian terhadap sarana prasarana yang diberikan. Upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah antara lain dengan melakukan peningkatan kinerja dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan kemampuan pegawai, pemanfaatan masyarakat dan membantu para warga yang menyandang permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah pegawai dilakukan dengan pemanfaatan Tenaga Harian Lepas, serta dengan Koordinasi dari perangkat daerah untuk bekerja sama dan terjun langsung ke masyarakat harus terus diupayakan. Bagaimana masyarakat Kota Palu bisa mendapatkan Pendidikan dan kehidupan yang layak harus diberikan perhatian agar terus diupayakan oleh pemerintah Kota Palu untuk menekan angka kemiskinan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Instansi saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Walikota Kota Palu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Perdagangan, dan Camat Kecamatan Palu Timur yang telah memberikan

kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, L. K. (2019). *Revitalisasi Pengaturan Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Penanggulangan Kemiskinan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. UNS (Sebelas Maret University).
- Hajra, S. (2022). *Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Parepare.
- Rasidin, K., & Bonar, M. (2004). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. *Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Dan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Makalah.*
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *PEMBANGUNAN EKONOMI, edisi 9, jilid 1*. Erlangga.

